

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 7, No. 2 Desember 2024
DOI: 10.31314/jsap.2024

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA

Rismi A. Dukomalamo[1], Asrudin Hormati[2], Irfan Zam Zam[3]

1. Program Studi Akuntansi, Universitas Khairun Ternate, Indonesia
2. Dosen Studi Akuntansi, Universitas Khairun Ternate, Indonesia
3. Dosen Studi Akuntansi, Universitas Khairun Ternate, Indonesia

Email; dukomalamorismi@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 15 September 2024, Disetujui: 23 November 2024, Publish 15 Desember 2024

Abstract:
This research was conducted in local governments in North Maluku province. The objective of this study is to examine the impact of independent variables, specifically financial performance measured by the degree of fiscal decentralization, regional financial dependence, SiLPA financing level, and regional financial efficiency, on the dependent variable, which is capital expenditure. This study used the technique of multiple linear regression. The findings of this study suggest that the degree of fiscal decentralization, regional financial dependence, level of SiLPA financing, and regional financial efficiency all have a simultaneous and significant impact on the allocation of capital expenditure. Specifically, the degree of fiscal decentralization and regional financial efficiency have a positive and significant effect on capital expenditure allocation, while regional financial dependence and the level of SiLPA financing do not have any effect on capital expenditure allocation.

Keywords: *regional financial performance, capital expenditure*

Abstrak:
Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah di provinsi Maluku Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen, khususnya kinerja keuangan yang diukur dengan derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, dan efisiensi keuangan daerah, terhadap variabel dependen, yaitu belanja modal. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, dan efisiensi keuangan daerah secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Secara spesifik, derajat desentralisasi fiskal dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan ketergantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Belanja modal.

PENDAHULUAN

Sejak berlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, telah terjadi pergeseran yang cukup besar dalam paradigma pengelolaan keuangandi tingkat daerah. Pembentukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dimandatkan setiap tahun melalui peraturan daerah (Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah No. 12 Tahun 2019). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan suatu daerah. Kemampuan keuangan yang memadai di tingkat daerah diperlukan untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif, selain sumber daya manusia (SDM) yang dapat dipercaya. Dorongan pertumbuhan ekonomi dapat dihasilkan melalui pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: keadilan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas biaya.

Otonomi daerah mengacu pada kewenangan yang diberikan pemerintah federal (pusat) kepada daerah dan teritori untuk mengatur diri mereka sendiri, serta untuk merumuskan, mengawasi, dan melaksanakan kebijakan dan anggaran di daerahnya. Meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan tanggung jawab dan keterbukaan dalam mengelola keuangan di tingkat daerah, memperluas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, serta mendorong demokratisasi di daerah merupakan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. (Yanto & Astuti, 2020).

Pemerintah daerah diberikan pernyataan yang jelas mengenai haknya dalam mengambil kebijakan daerah dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur hal tersebut. Istilah "manajemen" mencakup berbagai kegiatan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah itu sendiri, salah satu tujuan utama desentralisasi adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penyediaan layanan publik yang berkualitas.

Arfan dkk. (2023) menyatakan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola potensinya dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dan kontribusi tahunan merupakan indikator yang baik mengenai seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangannya. Mengukur keberhasilan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menilai jumlah uang yang diperoleh dari sumber daya alam atau

sumber-sumber lain yang dapat meningkatkan kesetaraan dalam tahun fiskal berjalan., sehingga pemerintah daerah harus mampu menciptakan ukuran kinerja pemerintah yang efektif.

Menurut Marlina (2019) Karena terbatasnya sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya merupakan kesulitan mendasar dalam penyusunan anggaran untuk sektor publik. Namun, proses penganggaran untuk mendistribusikan dana untuk belanja modal atau proyek-proyek pembangunan sarat dengan kepentingan politik. Pada kenyataannya, tujuan dari anggaran itu ialah untuk menyediakan fasilitas umum dan infrastruktur bagi masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah daerah di wilayahnya. Namun alokasi belanja modal tidak selalu tepat sasaran dan tidak menyelesaikan permasalahan masyarakat karena kepentingan politik lembaga legislatif terlibat dalam proses penganggaran (Keefer, 2005).

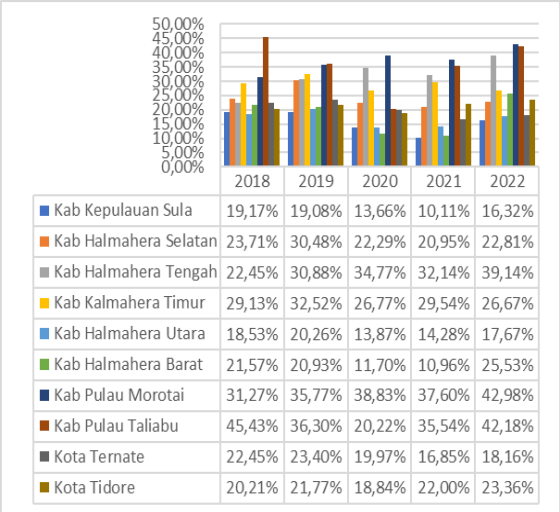
Peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita daerah dapat dipakai sebagai indikator keberhasilan ekonomi suatu daerah karena keduanya dapat menunjukkan pendapatan yang lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (Marlianita & Saleh, 2020). Agar hal tersebut dapat diwujudkan, tentunya pemberian fasilitas investasi oleh pemerintah daerah perlu dilakukan dengan peningkatan alokasi untuk meningkatkan investasi dalam modal. Seperti yang dinyatakan oleh Fakhry (2017) rasio belanja modal dapat dipakai untuk menentukan seberapa besar dana yang dialokasikan daerah untuk belanja modal. Tentu saja, karena tidak semua daerah memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan potensi pembangunan, masalah alokasi yang berkaitan dengan alokasi sumber daya akan muncul ketika penyusunan anggaran belanja daerah, khususnya belanja modal.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang diterima setiap daerah dari pemerintah pusat, khususnya untuk proyek-proyek modal. Permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran daerah, serta tindakan oportunistik pihak-pihak yang berkepentingan melalui kebijakan yang menentukan penyaluran dana tertentu untuk dialokasikan. Dari penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan menunjukkan bagaimana kondisi keuangan suatu daerah.

Belanja modal dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan keuangan daerah, menurut penelitian (Setiawan, 2019). Ketika pemerintah daerah membelanjakan uangnya untuk proyek modal, hal ini akan mengubah kondisi perekonomian dan mempengaruhi dunia usaha dan konsumen di daerah tersebut (Kuncoro & Mudrajat, 2004).

Gambar 1

Proporsi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara



	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Kepulauan Sula	19,17%	19,08%	13,66%	10,11%	16,32%
Kab Halmahera Selatan	23,71%	30,48%	22,29%	20,95%	22,81%
Kab Halmahera Tengah	22,45%	30,88%	34,77%	32,14%	39,14%
Kab Kalmahera Timur	29,13%	32,52%	26,77%	29,54%	26,67%
Kab Halmahera Utara	18,53%	20,26%	13,87%	14,28%	17,67%
Kab Halmahera Barat	21,57%	20,93%	11,70%	10,96%	25,53%
Kab Pulau Morotai	31,27%	35,77%	38,83%	37,60%	42,98%
Kab Pulau Taliabu	45,43%	36,30%	20,22%	35,54%	42,18%
Kota Ternate	22,45%	23,40%	19,97%	16,85%	18,16%
Kota Tidore	20,21%	21,77%	18,84%	22,00%	23,36%

Sumber: DJPK dan LHP BPK (diolah)

Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah pusat adalah menyisihkan tiga puluh persen dari keseluruhan pengeluaran untuk belanja modal. Besaran dari pengalokasian belanja modal yang dianggarkan pemerintah kabupaten atau kota Provinsi Maluku Utara masih bervariasi setiap tahunnya sesuai dengan rasio belanja modal. Selama lima tahun terakhir hanya Kabupaten Pulau Morotai yang konsisten mengalokasikan belanja modalnya sejumlah 30% sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah pusat, diantaranya yaitu pada tahun 2018 sejumlah 45,43%, tahun 2019 sejumlah 35,77%, tahun 2020 sejumlah 38,83%, tahun 2021 sejumlah 37,60% dan tahun 2022 sejumlah 42,98%. Sedangkan Sembilan Kabupaten/Kota lainnya masih belum bisa untuk konsisten mengalokasikan belanja modalnya sejalan dengan target 30% yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bahkan pada tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Barat menempati posisi terendah dalam pengalokasian belanja modal, yaitu Kab. Kepulauan Sula sejumlah sejumlah 10,11% dan Kab. Halmahera Barat sejumlah 10,96%. Dari situasi tersebut terlihat bahwa pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Maluku Utara masih belum memberikan prioritas yang cukup terhadap pembangunan daerah.

Tujuan utama penelitian berikut ialah untuk mengetahui pengaruh simultan dari rasio-rasio keuangan sepert: derajat desentralisasi fiskal, tingkat pembiayaan SiLPA, ketergantungan keuangan daerah dan efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak spesifik dari berbagai rasio yang berbeda terhadap alokasi belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara. Rasio-rasio tersebut meliputi tingkat desentralisasi fiskal, tingkat keuangan SiLPA, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian, riset ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif dengan melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang dikumpulkan. Mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara

terhadap distribusi belanja modal menjadi tujuan utama riset ini. Tingkat pembiayaan SiLPA, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah akan dipakai untuk mengukur kinerja keuangan.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penggunaan metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data panel untuk melakukan analisis regresi linier berganda. Mengingat penggunaan data runtun waktu (*time series*) dan *cross-sectional* dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah regresi data panel..

$$\boldsymbol{BM = \alpha + \beta 1\ RDD + \beta 2\ RTKD + \beta 3\ SiLPA + \beta 4\ REKD + \varepsilon}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Evaluasi regresi data panel menggunakan berbagai model, seperti Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Tiga pengujian uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier dipakai untuk memilih model yang sesuai. Berikut tahapannya:

1. Uji Chow

Tabel 1 berikut menggambarkan hasil uji Chow:

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	52,915625	9	0,0000

Sumber: Pengolahan Data E-Views 12 (2023)

Pada Tabel 1 terlihat probabilitas nilai *chi-square* penampang 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Model ini akan menggunakan fixed effect model sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan. Karena uji Chow yang dipilih menggunakan model fixed, maka perlu dilakukan pengujian berikutnya yaitu uji Hausman.

2. Uji Hausman

Tabel 2 berikut menggambarkan hasil uji hausman:

Tabel 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3,672133	4	0,4522

Sumber: Pengolahan Data E-Views 12 (2023)

Berdasarkan Tabel 2, nilai probabilitas *random cross-section* sebesar 0.4522 di atas ambang batas signifikansi 0.05. Hal ini menandakan bahwa model yang terpilih adalah model random. Dengan terpilihnya model random, maka sangat penting untuk melanjutkan dengan uji selanjutnya, yaitu uji Lagrange Multiplier (LM), seperti yang diuraikan di bawah ini.

3. Uji Lagrange multiplier

Tabel 3 berikut menggambarkan hasil Lagrange multiplier:

Tabel 3. Uji Lagrange multiplier

Lagrange Multiplier Tests For Random Effects		
	Test Hypothesis	
	Cross-Section	
Breusch-Pagan	25,90551	
	(0,0000)	

Sumber: Pengolahan Data E-Views 12 (2023)

Model yang dipilih dalam uji LM adalah model random. Nilai probabilitas sebesar 0.0000 dianggap signifikan secara statistik karena lebih rendah dari ambang batas 0.05, yang dibuktikan dengan hasil pengujian. Maka berdasarkan hasil penelitian, model random yang akan dipakai dalam penelitian ini.

B. Hasil Regresi Berganda Data Panel

Hasil dari proses pemilihan model yang ditampilkan di atas mengarah pada pemilihan model Random. Hasil regresi data panel yang dilakukan dengan E-Views 12 disajikan pada tabel berikut di halaman keempat

Tabel 4

Hasil Regresi dengan model random effect model

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	21.56838	1.476337	14.60939	**0.0000**
X1	0.050179	0.022131	2.267304	**0.0293**
X2	0.018394	0.011606	1.584866	**0.1215**
X3	0.010020	0.015305	0.654683	**0.5167**
X4	0.025256	0.007605	3.320894	**0.0020**

Sumber: Pengolahan Data E-Views 12 (2023)

1. Persamaan Regresi Berganda

Analisis yang dilakukan dengan bantuan program E-Views 12 menghasilkan temuan-temuan tertentu, yang dirinci di bawah ini:

BM = 21,56838 + 0,050179 RDD + 0,018394 RTKD + 0,010020 SiLPA + 0,025256 REKD + ε

a. Nilai koefisien konstanta sejumlah 21,56838 menandakan yaitu variabel Y akan bernilai 21,56838 X1, X2, X3, dan X4 bernilai nol.
b. Variabel X1 memiliki arah yang positif dengan nilai koefisien regresi sejumlah 0.050179. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan dalam satuan pada variabel Y akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan sejumlah 0,050179 pada X1.
c. Variabel X2 memiliki arah yang positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,018394. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan dalam satuan pada variabel Y akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan sejumlah 0,018394 pada X2.
d. Variabel X3 memiliki arah yang positif dengan nilai koefisien regresinya sejumlah 0,010020. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan dalam satuan pada variabel Y akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan sejumlah 0,010020 pada X3.
e. Variabel X3 memiliki arah yang positif dengan nilai koefisien regresinya sejumlah 0,025256. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan dalam satuan pada variabel Y akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan sejumlah 0,010020 pada ,025256 X3.

2. Hasil Uji Parsial

a. Pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap alokasi belanja modal

Jika dibandingkan dengan ambang batas signifikansi statistik sejumlah 0,05, nilai signifikansi X1 sebesar 0,0293 lebih rendah dari ambang batas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berdampak positif terhadap belanja modal. Meningkatnya rasio desentralisasi fiskal yang pada dasarnya mengindikasikan peningkatan kinerja keuangan daerah disebabkan oleh semakin besarnya alokasi dana belanja modal daerah. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan daerah diberikan oleh kebijakan desentralisasi fiskal. Terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana yang telah disisihkan untuk belanja modal agar dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada kemungkinan bahwa peningkatan pendanaan untuk proyek-proyek besar akan bermanfaat bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Temuan riset ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018), R. S. Putri & Rahayu (2019), Mulyani & Fitra (2023), Ma'arif & Sari (2022), Olandari dkk (2023), Praza (2016), Oktavianti (2020) dan Amelia & Periansya (2022) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi secara positif oleh rasio derajat desentralisasi fiskal. Namun demikian, temuan riset ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso & Restianto (2011), Marlianita & Saleh (2020), Khafif & Romandhon (2022), Sartika dkk (2017), dan Rahmawati (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara tingkat desentralisasi fiskal dan alokasi belanja modal.

b. Pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal

Jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05 yang ditetapkan sebelumnya, nilai 0,1215 jauh lebih tinggi. Dengan demikian, Belanja modal tidak dipengaruhi oleh rasio ketergantungan keuangan daerah (X2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal, berapapun besarnya nilai rasio tersebut.

Pasalnya, dana perimbangan DAU disumbangkan dalam jumlah besar, yang terutama dipakai untuk menutupi biaya operasional dan pegawai. Inilah alasan mengapa investasi pada infrastruktur daerah tidak mendapat prioritas utama. Dibandingkan dengan DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah disalurkan ke daerah terbilang lebih kecil. Sesuai aturan, jenis proyek atau kegiatan yang berhak mendapat dana DAK hanya mendapat kontribusi dua puluh lima persen dari APBD.

Oleh karena itu, DAK tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja modal.

Pemerintah daerah yang memperoleh sebagian besar dana belanja modal secara eksklusif dari DAK akan mempertahankan proporsi belanja modal yang relatif kecil dalam APBD, mengingat jumlah DAK, yang dalam struktur dana perimbangan lebih kecil dari DAU. Menjelang akhir tahun fiskal, penerimaan DBH bukan pajak biasanya terkendala oleh Dana Bagi Hasil (DBH). Akibatnya, DBH jarang dibelanjakan dan menjadi dana yang tidak aktif (*dormant fund*), alhasil mengurangi kemungkinan pemerintah daerah untuk menggunakan DBH untuk membiayai belanja modal, dan hal ini berdampak kecil pada jumlah alokasi belanja modal.

Konsisten dengan hasil penelitian Devi dkk (2022), Marlianita & Saleh (2020), Sartika dkk (2017), dan Novita & Nurhasanah (2020) Temuan riset ini menandakan yaitu distribusi belanja modal tidak terpengaruh oleh rasio ketergantungan keuangan daerah. Namun berbeda dengan Marlina dkk. (2017), Rahmawati (2020), dan Sularso & Restianto (2011a) yang menemukan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berdampak kepada alokasi belanja modal.

c. Pengaruh rasio tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal

Nilai signifikansi yang dihitung adalah 0,492, yang berada di atas batas signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Oleh karena itu, Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan belanja modal.

Temuan riset ini menandakan yaitu hubungan antara rasio tingkat pembiayaan SiLPA dengan penyaluran belanja modal tidak berdampak sama sekali. Hal ini terutama disebabkan oleh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara yang memanfaatkan SiLPA untuk membiayai perolehan jasa dan barang yang umur simpannya kurang dari satu tahun, atau untuk melaksanakan program serta kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu diketahui bahwa rata-rata SiLPA tiap kota dan kabupaten di Provinsi Maluku Utara relatif rendah, yaitu rata-rata kurang dari 10%. Berikut ialah sesuatu yang harus disebutkan. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran pemerintah terserap secara penuh, melebihi 90%. Hal ini membuat dampak pembiayaan daerah yang berasal dari SiLPA terhadap alokasi belanja modal menjadi tidak signifikan.

Hasil riset ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sartika dkk. (2017), Huda dkk. (2015), Zelmiyanti (2016), Febriana & Praptoyo (2015), dan Nuzana & Riharjo (2016) yang menemukan bahwa rasio tingkat pembiayaan SiLPA tidak berdampak kepada alokasi

belanja modal. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya yaitu Shatila dkk. (2023) Marlianita & Saleh (2020) Rosadi & Suputra (2017) yang menemukan adanya korelasi positif antara rasio tingkat pembiayaan SiLPA dengan alokasi belanja modal.

d. Pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal

Dengan angka 0,036, tingkat signifikansi yang diamati lebih kecil dari ambang batas yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3) dengan Belanja Modal (Y). Hal ini menunjukkan bagaimana belanja modal akan dipengaruhi oleh semakin besar atau kecilnya rasio efisiensi keuangan daerah.

Hal ini dikarenakan salah satu ukuran kinerja keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan pengelolaan fiskal di tingkat daerah adalah efisiensi keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah yang efisien mengacu pada kemampuan suatu daerah dalam menjalankan strategi pertumbuhan untuk tahun fiskal saat ini dengan memaksimalkan jumlah uang yang diterima di luar pengeluaran pemerintah. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah dapat secara efektif melaksanakan seluruh kebijakan alokasi belanja, termasuk belanja modal, sesuai dengan pendapatan yang diterimanya secara maksimal.

Hasil penlitian ini sejaran dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif & Arza (2018), Wibisono dkk (2021), Putri & Rahayu (2019), Devi dkk (2022), Oktavianti (2020), Ayu dkk (2019), dan Andriyani (2020) Temuan penelitiannya menandakan yaitu distribusi belanja modal dipengaruhi secara positif oleh efisiensi keuangan daerah. Namun Riset ini bertentangan dengan temuan Fitri (2014), Satria (2021), dan Muranah (2020) yang menemukan tidak adanya korelasi antara rasio efisiensi keuangan di tingkat daerah dengan distribusi belanja modal.

3. **Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 4,130297 dan nilai signifikansi sebesar 0,007257. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari tingkat probabilitas yang telah ditentukan yaitu α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2018-2022, belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rasio efisiensi keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA, dan rasio ketergantungan keuangan daerah.

4. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0.233948, yang merepresentasikan persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel yang sedang diuji. Hasil ini

akan dikonversikan ke dalam bentuk persentase. Oleh karena itu, variabel independen mampu menjelaskan 23,3% dari belanja modal yang diteliti dalam penelitian ini. Terlepas dari kenyataan bahwa 76,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dikuantifikasi dalam model regresi ini, terdapat variabel-variabel tambahan yang berpotensi mempengaruhi belanja modal. Variabel-variabel tersebut antara lain Rasio Derajat Kontribusi BUMD, Rasio Keserasian Belanja, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Distribusi belanja modal tidak tergantung pada persentase desentralisasi fiskal. Hal ini menandakan yaitu jumlah alokasi belanja modal tidak terpengaruh oleh perubahan rasio derajat desentralisasi fiskal.
2. Distribusi belanja modal tidak terpengaruh oleh rasio ketergantungan keuangan daerah. Hal ini menandakan yaitu jumlah alokasi belanja modal tidak terpengaruh oleh perubahan rasio ketergantungan keuangan daerah.
3. Distribusi belanja modal tidak terpengaruh oleh rasio tingkat pembiayaan SiLPA. Hal ini menandakan yaitu naik atau turunnya rasio tingkat pembayaan SiLPA tidak akan mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal.
4. Distribusi belanja modal secara signifikan dipengaruhi oleh rasio efisiensi keuangan daerah. Hal ini menandakan yaitu apabila tingkat efisiensi suatu daerah semakin baik maka pengalokasian belanja modal juga akan semakin baik.

Referensi

Amelia, M., & Periansya, P. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan SiLPA Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Selatan. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, *7*(2), 740. https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.563

Andriyani, N., Mukhzarudfa, M., & Diah PA, E. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, *5*(2), 132–144. https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263

Arif, M., & Arza, F. I. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi Volume*, *9*(2), 21–36. https://doi.org/https://doi.org/10.36600/rma.v9i2.66

Ayu L, A., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, *4*(2), 1–15. https://doi.org/10.22437/jaku.v4i2.7792

Devi, A. S., Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal

Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, *4*(8.5.2017), 2003–2005. https://www.jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1872/1228

Fakhry, S. M. (2017). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung*. https://digilib.unila.ac.id/28723/12/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Febriana, I. S., & Praptoyo, S. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, *4*(9), 1–22. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3188/3204

Fitri, V. K. (2014). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012. *Jurnal Online Mahasiswa*, *1*(1), 1–15. https://media.neliti.com/media/publications/33346-ID-pengaruh-rasio-keuangan-daerah-pendapatan-asli-daerah-pad-dan-dana-alokasi-umum.pdf

Huda, A. S., Herwanti, R. T., & Pancawati, R. S. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat. *ASSETS: Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, *5*(2), 151–166. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/.v5i2.1194

Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *7*(9), 4713. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i09.p04

Keefer, P. (2005). Democracy, Public Expenditures, and the Poor: Understanding Political Incentives for Providing Public Services. *The World Bank Research Observer*, *20*(1), 1–27. https://doi.org/10.1093/wbro/lki002

Khafif, A., & Romandhon. (2022). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah*, *2*(2), 38–46. https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jamasy/article/view/2686

Kuncoro, & Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Airlangga.

Ma'arif, R. Y., & Sari, S. P. (2022). Rasio-Rasio Penting Bagi Alokasi Belanja Modal: Suatu Kajian Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Seminar Nasional Lppm Ummat*, *1*, 383–392. http://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/9708%0Ahttp://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/download/9708/5044

Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, *1*(1), 25–35. https://doi.org/https://doi.org/10.35313/iarj.v1i1.2357

Marlina, L. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Budget Ratcheting Terhadap Alokasi Belanja Modal (Bukti Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *2*(2), 34–44. https://doi.org/10.35308/akbis.v2i2.931

Marlina, L., Indriani, M., & Fahlevi, H. (2017). Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal (Studi Pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Akuntasi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, *6*(1), 21–30. https://jurnal.usk.ac.id/JAA/article/view/7274

Mulyani, S., & Fitra, H. (2023). Pengaruh Rasio Derajat Disentralisasi, Rasio Kemandirian Keuagan Daerah dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, *1*(2), 135–144. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.11

Muranah. (2020). *Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kaerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017* [Universitas Pancasakti Tegal]. http://repository.upstegal.ac.id/2668/

Novita, I., & Nurhasanah, N. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2012-2017). *Jurnal Buana Imu*, *4*(2), 64–77. https://doi.org/10.36805/bi.v4i2.1050

Nuzana, M., & Riharjo, I. B. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *5*(10), 1–22. issn: 2460-0585

Oktavianti, Y. A. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(11), 1–20. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3782

Olandari, E., Feblin, A., & Dona, E. M. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera SelatanTahun 2017-2021. *Jurnal ETAP*, *3*(1), 30–48. https://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/download/2155/1344

Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *4*(1), 25–36. https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3530

Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat (Studi Empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017). *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, *3*(2), 256–268. https://doi.org/https://doi.org/10.36555/jasa.v3i2.429

Rahmawati, Y. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)*. *3*, 274–282.

Rosadi, A. I., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum Dan SiLPA Pada Alokasi Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *19*(2), 1144–1173. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/26706

Sartika, N., Kirmizi, K., & Indrawati, N. (2017). Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Sorot*, *12*(2), 121. https://doi.org/10.31258/sorot.12.2.4902

Satria, M. R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di PSTNT di Batan Bandung. *Land Journal*, *1*(2), 159–166. https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.708

Setiawan, H. P. (2019). *engaruh rasio*

keuangan terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Shatila, A., Rahayu, S., & Jumaili, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Lentera Bisnis*, *12*(2), 489. https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i2.772

Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011a). Pengaruh kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, *1*(2).

Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011b). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, *1*(2), 282. https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/22

Wibisono, N., Indartini, M., & Rahayu, E. E. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Bakorwil Madiun. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, *10*(2), 83–88. https://doi.org/10.33319/jeko.v10i2.91

Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, *2*(3), 346–357. https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i3.484

Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, *7*(1), 11–21. https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/727